

Judul : Muncul PDSI, Senayan siap revisi UU Praktik Kedokteran
Tanggal : Jumat, 20 Mei 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Muncul PDSI

Senayan Siap Revisi UU Praktik Kedokteran

SENAYAN berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Langkah ini dilakukan untuk merespons aspirasi dari organisasi profesi dokter yang baru, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI).

Anggota Komisi IX DPR Putih Sari mengatakan, revisi UU Praktik Kedokteran dimungkinkan karena adanya aspirasi beberapa pihak.

"Terkait wadah tunggal organisasi profesi kedokteran, apakah masih relevan untuk dipertahankan," ujar Putih Sari, kemarin.

Dia bilang, UU Praktik Kedokteran mengatur IDI (Ikatan

Dokter Indonesia) sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran. Wadah tunggal profesi ini dikhawatirkan menjelma menjadi otoriter dan mengusung kepentingan lain.

Untuk itu, Komisi IX DPR akan melihat sejauh mana aspirasi ini dan substansinya.

"Siapa pun boleh membentuk wadah perkumpulan karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar, bebas berserikat," tandas politikus Gerindra ini.

Putih berharap, apa pun organisasinya, dapat meningkatkan kualitas dunia kedokteran di Indonesia. "Munculnya PDSI dapat meningkatkan kualitas dunia

kedokteran tanah air," harap dia.

Senada, anggota Komisi IX Aliyah Mustika Itham mendukung adanya peluang revisi UU Praktik Kedokteran. Revisi perlu dilakukan untuk melindungi profesionalisme dokter. Hal ini mengingat bahwa dokter adalah profesi yang menuntut keprofesionalan tinggi.

Aliyah berharap, kehadiran PDSI mampu menjadi solusi berbagai masalah profesi dokter.

"Sebelumnya hanya ada organisasi tunggal terkait kedokteran, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI)," ujar Aliyah dalam keterangannya, kemarin.

UU Praktik Kedokteran saat ini,

kata dia, mengatur tentang organisasi profesi kedokteran tunggal yakni IDI. Dengan terbentuknya PDSI, tentu harus dilakukan revisi terhadap UU tersebut.

"Tapi tetap memperhatikan berbagai hal lainnya terkait kelemahan dan kelebihan jika dilakukan revisi," kata dia.

Politikus Demokrat ini berharap, profesi kedokteran makin berkualitas tanpa intimidasi.

"Kita tidak menginginkan adanya intimidasi dari pihak manapun, yang mengakibatkan para dokter tidak maksimal dalam pengabdianya. Karena hal ini menyangkut kemaslahatan umat," pungkasnya. ■ TIF